

---

## SIKAP POLITIK ELIT NU PASCA KEMBALI KE KHITTAH DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 1984-1998

**Faizal Imam**

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang  
historiaunnes@gmail.com

### ABSTRACT

NU in Wonosobo was established in 1933. NU Wonosobo branch was established to spread Islam in accordance with the understanding of *ahlussunnah wal Jama'ah*. That role is run by clerics who are in NU. Kyai in NU itself has a very important role, because it acts as elite clerics in the NU but also as a leader in the community. Every decision or position that is taken by the clerics will influence the students and also for local people, including attitude in politics. Figures who contributed to the establishment of a branch NU Wonosobo include Sayyid Ibrahim, KH Kyai Abu Jamroh and Kyai Hasbillah Bumen. Wonosobo NU itself visible role when joining the Hezbollah and Sabilillah in maintaining the independence of Indonesia. Before Khittah figures NU elite joined the PPP as a manifestation of their support for the PPP as a party fusion. Basically the political elite, NU Wonosobo, reflecting the dynamics of politics in Wonosobo regency itself. Stance taken NU elite who joined Golkar (KH Muntaha and KH Habib Idris) is a political strategy, where the entrance to the government system, the ideas can be heard while the citizens Nadliyin elite survive in PPP (KH Zainuddin and KH Ibrahim) after Khittah based because PPP remains the Islamic party that must be fought. The impact of each of the political attitudes of NU elite in Wonosobo, making some aspects of change, such as the impact of the government, NU organizations, political parties, and political choices Nahdliyin

**Keywords:** Attitude, Politics, Elite, NU Wonosobo

### ABSTRAK

Nahdatul Ulama di Wonosobo berdiri pada tahun 1933. NU cabang Wonosobo didirikan untuk menyebarkan agama Islam sesuai dengan faham *ahlussunnah wal jama'ah*. Peran tersebut dijalankan oleh para kyai yang berada di NU. Kyai dalam NU sendiri memiliki peranan yang sangat penting, karena kyai berperan sebagai elit dalam tubuh NU sekaligus sosok pemimpin dalam masyarakat. Setiap keputusan atau sikap yang diambil oleh kyai tentu akan berpengaruh pula terhadap santri dan juga masyarakat yang berada disekitarnya, termasuk sikap dalam berpolitik. Tokoh yang berjasa dalam berdirinya NU cabang Wonosobo antara lain Sayyid Ibrohim, K.H Kyai Abu Jamroh dan Kyai Hasbillah Bumen. Peran NU Wonosobo sendiri terlihat ketika bergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Khittah tokoh-tokoh elit NU bergabung bersama PPP sebagai wujud dukungan mereka pada PPP sebagai partai fusi. Pada dasarnya politik elit NU Wonosobo, mencerminkan dinamika perpolitikan di Kabupaten Wonosobo itu sendiri. Sikap yang diambil elit NU yang bergabung ke Golkar (K.H Muntaha dan K.H Habib Idris) adalah sebagai strategi politik saja, dimana dengan masuk pada sistem pemerintah, ide-ide warga Nadliyin bisa didengar sedangkan elit yang bertahan di PPP (K.H Zainuddin dan K.H Ibrohim) setelah Khittah dilandasi karena PPP tetap partai Islam yang harus diperjuangkan. Dampak dari sikap politik masing-masing elit NU di Wonosobo, membuat beberapa aspek mengalami perubahan, seperti dampak bagi pemerintah, organisasi NU, partai politik, dan pilihan politik warga NU.

**Kata Kunci :** Sikap, Politik, Elit, NU Wonosobo

---

#### Alamat korespondensi

Gedung C2 Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang 50229

## Pendahuluan

Bagi sebagian orang yang kurang akrab dengan NU, jika nama itu disebut, maka akan berasosiasi pada sosok ulama berjubah dan bersorban, yang bergerak perlahan menjaga keanggunan dirinya, yang hanya paham akan hukum – hukum agama saja, dan kalau tampil di arena politik, maka sosok itu akan bertampang kaku. Itu hanyalah gambaran secara lahiriyah semata. Nahdatul Ulama (NU) merupakan fenomena dalam sejarah Islam di Republik Indonesia. NU sebagai organisasi Islam berhaluan ahlusunnah Wal Jamaah yang berpegang teguh pada salah satu dari empat madzhab, yaitu madzhab Imam Syafi'i. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 dalam rapat alim ulama ' yang diselenggarakan untuk membentuk suatu organisasi dan untuk mengirim utusan ke muktamar Islam di Mekkah, dengan tugas memperjuangkan hukum – hukum ibadah dalam empat madzhab (Sholikhin, 2005 : 50 – 51).

Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) merupakan partai politik Islam yang Independen merupakan gabungan semua golongan Islam yang didorong oleh semangat persatuan agar umat Islam mempunyai kekuatan yang utuh dan padu untuk memperjuangkan aspirasi Islam (Sitompul, 2010 : 87). Pembentukan Partai Masyumi didorong oleh keluarnya Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk membentuk partai politik. Perubahan orientasi Masyumi dari organisasi keagamaan menjadi partai politik dilakukan melalui upaya menampung aspirasi politik umat Islam tradisional dan umat Islam reformis. Ini merupakan kali pertama NU muncul dalam kancah politik praktis dalam arti formal.

Keputusan hasil muktamar NU ke – 19 di Palembang yang menyatakan NU berdiri menjadi partai politik (Daman, 2001 : 101). Pada pemilu tahun 1955 NU ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, pemerintahan memberlakukan sistem penyederhanaan partai dalam tiga kelompok besar, yaitu: Kelompok nasionalis, spiritual, dan Golkar. Akibatnya, NU bersama PSII, Perdi, dan Parmusi pada tanggal 5 Januari 1973 difusikan dalam satu wadah politik bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Nasib NU dalam PPP tidak jauh berbeda dengan nasibnya di Masyumi yaitu NU jarang menempati posisi strategis dalam susunan kepemimpinan PPP.

Kembalinya NU ke *khittah* memberikan harapan baru bagi generasi berikutnya yaitu melihat NU dengan wajah baru yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan. NU diharapkan mampu mempunyai waktu yang cukup untuk memperhatikan masalah – masalah seperti lembaga pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, dan NU dapat mengelurkan kritiknya yang bersifat konstruktif kepada pemertintah dengan leluasa.

Keberadaan Kyai dengan segala kekayaan tradisi dan jaringan sosialnya merupakan pilar penting dan telah memberi kontribusi bagi perkembangan NU (Ummatin, 2002:7). Perjuangan – perjuangan NU dalam bidang sosial keagamaan , pendidikan, pengembangan masyarakat dan bidang politik se-bagaian besar berada ditangan kyai, sehingga sulit memisahkan NU dan Kyai, karena keduanya memiliki hubungan sosial dan kultural yang sangat kuat.

Ummatin (2002:21) menyatakan bahwa kyai sebagai elit dalam tradisi NU memunculkan adanya konstruksi sosial yang menempatkan kyai sebagai individu yang memiliki integritas moral dan selalu memiliki pengikut. Konstruksi yang demikian menjadikan kyai atau ulama menempati posisi elit dalam masyarakat NU. Warga NU selalu menjadikan kyai sebagai rujukan dalam bersikap, sehingga warga NU seringkali tidak mampu bersikap dan berpikir rasional. Kedudukan sebagai elit, apa yang dilakukan kyai akan diikuti oleh para pengikutnya, demikian juga sikap memilih dalam partai politik yang dilakukan kyai akan berdampak nyata pada pilihan – pilihan politik yang dilakukan oleh warga NU.

Dalam masyarakat Kabupetan Wonosobo, yang nota bennya adalah masyarakat pesantren dan pengikut NU, kyai memiliki kedudukan yang sangat strategis. Tidak hanya dilembaga pesantren yang diasuhnya saja, namun juga kharismanya di mata masyarakat luas Wonosobo sangat dominan.

Kabupaten Wonosobo yang dikenal sebagai Kota Santri memiliki peran yang sangat strategis dalam konstelasi politik, baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Tidak sedikit tokoh – tokoh politik nasional yang datang kepada kyai – kyai Wonosobo untuk memperoleh dukungan dan legitimasi politik. Dalam menyikapi isu politik pasca NU memutuskan kembali ke Khittah 1926, para kyai di Wonosobo memiliki sikap yang berbeda – beda. Ada yang tetap bertahan dalam Partai Persatuan Pembangunan dan ada yang beralih mendukung Golkar. Lahirnya PKB sebagai produk

NU juga turut merubah arah politik elit NU di Kabupaten Wonosobo setelah tumbanganya Orde Baru.

Melihat adanya fenomena tersebut maka akan dibahas tiga rumusan masalah dalam penelitian ini (1). Bagaimana perkembangan NU di Kabupaten Wonosobo sebelum tahun 1984 ? (2). Bagaimana sikap elit NU di Kabupaten Wonosobo dalam politik tahun 1984 – 1998? (3). Bagaimana dampak sikap politik elite NU Pasca Kembali ke Khittah di Kabupaten Wonosobo tahun 1984 – 1998 ? Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan NU di Kabupaten Wonosobo sebelum tahun 1984. (2). Untuk mengetahui sikap politik elit NU di Kabupaten Wonosobo dalam politik tahun 1984 – 1998. (3). Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas sikap politik yang diambil oleh elit NU di Kabupaten Wonosobo tahun 1984 – 1998. Manfaat dari penelitian ini adalah (1). Dapat dijadikan refrensi bagi penelitian lebih lanjut tentang perkembangan sikap politik elit NU di Kabupaten Wonosobo. (2). Memperkaya khasanah sejarah lokal dalam upaya melengkapi sejarah nasional. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup temporal dan spasial. Untuk ruang lingkupnya dimulai dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1998, tahun tersebut dipilih penulis karena tahun 1984 adalah tahun dimana NU kembali ke *Khittah* dan 1998 adalah berubahnya pemerintahan di Indonesia. Ruang lingkup spasialnya adalah Kabupaten Wonosobo.

Sebagai landasan penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu. Terdapat 5 buku yang dijadikan penulis untuk tinjauan pustaka. (1). *Perilaku Politik Kyai Kaluwungu*, penulis Dr. H. Hamdani, M.Ag, diterbitkan oleh Anggaran DIPA IAIN Wali Songo Semarang, tahun 2012, dengan tebal buku XXI + 102 halaman. (2). *Politik Kyai, Polemik Keterlibatan Kyai dalam Politik praktis*, karangan Koirudin, diterbitkan oleh Averros Press Malang, tahun 2005 (cetakan pertama), dengan tebal buku XXI + 162 halaman. (3). Buku karangan Martin van Bruinessen yang berjudul *NU: Tradisi, Relasi – relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, yang diterbitkan oleh Lkis Yogyakarta tahun 1999 (cetakan ketiga) dengan tebal VII + 311 halaman. (4). Buku karangan Rozikin Daman yang berjudul *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, yang diterbitkan oleh Gama Media Yogyakarta, tahun 2001 (cetakan Pertama), dengan tebal buku XVI + 276 halaman. (5). Buku yang ber-

judul *Perilaku Politik Kyai* karangan Khoiro Ummatin. Buku ini diterbitkan oleh pustaka pelajar Yogyakarta tahun 2002 (cetakan pertama), dengan tebal VII + 135 halaman.

### **Metode Penelitian**

Metode peneliitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1975;32). Menurut Basri (2006 :35) metode sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip – prinsip dasar yang sistematis yang digunakan dalam proses pengumpulan data atau sumber – sumber, mengerti dan menafsirkan serta menyajikannya secara sintesis dalam bentuk sebuah cerita sejarah (historiografi). Metode Sejarah sendiri terdiri atas beberapa bagian yaitu : (a) Heuristik merupakan tahapan awal yaitu dimana tahapan mengumpulkan dan pencarian sumber – sumber terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. (b) Kritik Sumberdapat dilakukan setelah proses pengumpulan sumber dilakukan. Proses ini sangat penting mengingat sumber – sumber yang telah diketemukan harus dicari mana yang benar – benar fakta dan mana yang bukan. Kritik sumber sendiri terdiri atas dua kritik yaitu kritik internal dan kritik eksternal. (c) Interpretasi Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 prosedur yaitu analisis selama proses pengumpulan data dan analisis setelah data terkumpul (Miles dan Haberman, 1998: 21 – 24). Analisis ini dalam bahasa metode penelitian peristiwa sejarah dinamakan interpretasi sumber. (d) Historiografi yaitu menuliskan data yang telah diinterpretasikan tadi menjadi sebuah kesatuan yang urut dan sistematis. Kemampuan dalam membuat susunan cerita atau fakta sejarah yang menarik dengan kata lain akan lebih baik apabila seorang pengarang yang baik mampu menyajikan fakta – fakta yang kering dalam bentuk cerita yang menggugah pembacanya.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Sejarah dan Perkembangan NU Wonosobo**

Pendirian NU di Wonosobo berawal dari diadakannya Mukhtamar NU di Cirebon pada tanggal 29 Agustus 1931 atau 12 Rabiul Tsani 1350 H. NU di Wonosobo tepatnya berdiri pada tahun 1933. NU Wonosobo sendiri dilantik di rumah Sayyid Ibrohim (Kauman Utara samping Gedung PRIMKOVERI, saat ini),

dengan dihadiri oleh ulama' dan Kyai – Kyai Wonosobo serta masyarakat. Tokoh NU yang hadir kala itu adalah K.H. Wahab Hasbullah, yang bertindak sebagai pembaca Al – Qur'an adalah Mbah Muntaha Kalibeber yang waktu itu masih remaja. Rois Syuriah pertama Sayyid Ibrohim dan katibnya Sayyid Muhsin, keduanya antara abah dan anak, Ketua Tanfidziyah Atmodimejo dan sekretarisnya Abu Bakar (Muzan, 2003 : 14).

Perkembangan NU Wonosobo sama seperti cabang-cabang NU yang berada di tempat lain pada awal terbentuknya, yaitu belum terorganisir dengan baik. Pada saat perang mempertahankan kemerdekaan di Wonosobo juga dijadikan basis pertahanan tentara oleh Hizbullah dari Karisidenan Kedu dan ketika terjadi Agresi Militer Belanda II tepatnya di daerah Kepil. Karena kondisi saat itu tidak memungkinkan mengakibatkan NU tidak bisa mengkonsolidasi organisasi dengan efektif sehingga untuk mengefektifkan dibutuhkan pimpinan inti Majelis Konsul NU dengan tenaga – tenaga ulama Kyai Muhammad, Kyai Jamil, Kyai Idris (Wonosobo), Kyai Baidlowi dan dibantu oleh ulama – ulama daerah Wonosobo (Muzan, 2003: 21).

Bagi NU Wonosobo, semenjak awal telah menerapkan aturan – aturan sebagaimana Anggaran Dasar NU. Terbukti dengan adanya syuriah yang terdiri dari para ulama serta tanfidziyah dari kalangan masyarakat biasa. Pengambilan keputusan dalam NU dilakukan dalam sebuah wadah permusyawaratan, yang memiliki peringkat dimana hirarki dan kekuatan hukum yang dihasilkan juga menyesuaikan dengan peringkatnya (Muzan, 2013 : 58).

Sikap Politik Elit NU di Kabupaten Wonosobo Sebelum tahun 1984

Elit NU di Kabupaten Wonosobo mulai muncul pasca terbentuknya kepengurusan NU di Kabupaten Wonosobo, ada beberapa elit NU disini adalah para kyai yang terlibat secara langsung dalam NU Wonosobo. Kyai sendiri dipandang sebagai ulama sekaligus, yaitu suatu istilah yang merujuk pada gelar untuk ahli agama dalam tradisi Islam Sunni. Setelah wafatnya tokoh-tokoh senior pendiri NU Wonosobo, maka kemudian berganti generasi ke tokoh yang lainnya. Tokoh – Tokoh elit NU Wonosobo antara lain KH. Muntaha (Kalibeber), Kyai Idris (Kauman), KH. Ibrohim (Jawar), K.H Dimiyati (Kalilawang), K.H. Zainuddin (Tempelsari), KH. Ihwan (Tambi), KH. M. Syukur (Wonosobo) (Dokumen PCNU Wonosobo). Diantara tokoh – tokoh diatas juga

merupakan pimpinan pondok-pondok pesantren besar di Wonosobo, salah satunya adalah KH. Muntaha beliau merupakan pengasuh sekaligus pemimpin pondok pesanter Al Asy'ariyyah Kalibeber.

Sikap politik yang ditunjukkan oleh elit NU Wonosobo sebelum tahun 1984 keseluruhannya hampir satu suara ketika berbicara urusan politik, artinya mereka berada dalam satu faham dan ide yang sama dalam berpolitik. Saat NU bergabung bersama Masyumi dan kemudian keluar karena terjadi persoalan internal di tubuh Masyumi, NU Wonosobo juga mengikuti anjuran tersebut. Setelah keluar dari Masyumi kemudian NU membentuk partai sendiri bernama partai NU. Keputusan ini merupakan keputusan pengurus pusat NU sehingga secara otomatis akan langsung diikuti oleh cabang – cabang NU di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Wonosobo. Para kyai di Kabupaten Wonosobo pun ikut terlibat dalam urusan politik, meskipun sebagian dari mereka masih awam dengan dunia politik ini (Wawancara dengan KH. Habib Idris pada tanggal 30 Desember 2014).

Perilaku politik Kyai NU di Wonosobo tidak terlepas dari sikap politik yang diambil dalam memilih Partai Politik. Pada saat Orde baru dan NU bergabung dengan PPP, para Kyai juga ikut terlibat dalam menyumbangkan suara mereka di PPP untuk massa beberapa kali pemilu. Akan tetapi juga ada tokoh Kyai yang mendukung Golkar pada saat menjelang NU kembali ke *Khittah* namun hanya sebagian kecil saja dan berada di pelosok pedesaan yang dipengaruhi oleh kekuatan Golkar dari bawah seperti kepala desa (Wawancara dengan Ahmad Muzan pada tanggal 27 Desember 2014).

Semasa berada di PPP, elit NU lebih berjuang untuk memajukan dunia pendidikan di Wonosobo. Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU) pada tahun 1975 juga merupakan salah satu langkah yang diambil oleh elit NU pada waktu itu.

Sikap Politik Elit NU di Kabupaten Wonosobo Tahun 1984 - 1998

Pasca kembali ke *Khittah* NU tidak lagi terikat oleh partai dan organisasi politik mana pun. NU menyerahkan segala urusan politik pada masing-masing individu NU untuk menentukan sikap masing-masing. Disinilah hal yang menarik, dimana NU merupakan organisasi Islam terbesar dan memiliki jumlah anggota terbanyak diseluruh Tanah Air, hal ini tentu akan merangsang partai politik selain PPP untuk menarik warga NU untuk bergabung. Banyak cara yang ditempuh mulai

dari kampanye terbuka sampai mengajak elit NU untuk bergabung. Namun, kemudian hari ketika Elit NU Wonosobo ada yang memutuskan bergabung dengan Golkar itu tidak karena diajak, namun karena strategi politik. Ada empat tokoh yang menjadi pusat penelitian penulis, yaitu : K.H Muntaha Al-Hafidz Kalibeber, K.H Habibulloh Idris Kauman, K.H Zainuddin Tempelsari dan K.H Ibrahim Jawar. Keempat elit NU mengambil jalan yang berbeda-beda.

### **Elit NU yang Berada di Golkar**

K.H. Muntaha Al-Hafidz dilahirkan pada tanggal 9 Juli 1912 di Wonosobo. Beliau merupakan pengasuh pondok Al-Asy'ariyyah. Pendidikan yang ditempuh oleh K.H. Muntaha mulai dari sekolah formal di Madrasah Darul Ma'arif Banjarnegara dan kemudian pendidikan yang lain beliau habiskan dengan belajar di satu pesantren yang satu ke pesantren yang lain (Suyono & Munir, 2004 : 21). Sikap politik yang diambil Mbah Mun (sapaan akrab K.H. Muntaha) ketika beliau memutuskan untuk beralih pada Golkar juga di latar belakang oleh keadaan saat itu. Kala itu anggapan orang NU apabila masuk ke Golkar sebelum *Khittah* itu ibarat sholat yang belum masuk pada waktunya (wawancara langsung dengan Drs.K.H. Muchotob Hamzah, M.M pada tanggal 5 Januari 2015).

*“Mbah Mun, mengambil sikap untuk beralih ke Golkar karena dia adalah seorang pendidik, kalau komitemn pada NU dia sangat komitmen, dia pernah menjadi tokoh PPP, ketika dia tahu bahwa nasib pendidikan di kalangan NU terlalu jauh tertinggal karena hubungan yang jauh dengan pemerintah, oleh karena itu kemudian Mbah Mun memilih Golkar”* (wawancara langsung dengan Drs.K.H. Muchotob Hamzah, M.M pada tanggal 5 Januari 2015).

K.H. Muntaha kemudian menjelaskan posisi Ulama dan Kyai berada di tengah itu bukan berarti di Golkar. Yang dimaksud K.H. Muntaha adalah ulama harus bisa menampung seluruh aspirasi umat yang berkaitan dengan persoalan agama. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah berkembang dimasyarakat, tentu ulama tidak bisa sendiri, harus bekerjasama dengan pemerintah. Beliau juga memandang bahwa para elit yang lain juga jangan terlalu sering meninggalkan pesantren, apalagi untuk urusan politik, meskipun menurut beliau tetap harus ada kyai yang berada di DPR dan lembaga – lembaga pemerintah yang lain, baik itu melalui PPP, Golkar, atau PDI. Sebab, kalau di sana tidak

ada ulama, ya bisa *njomplang* (tidak seimbang) akibatnya (Suara Merdeka, Sabtu, 19 Oktober 1991 dalam Suyono & Munir).

K.H. Muntaha juga tidak luput membahas mengenai kemajuan yang sudah dicapai NU ketika kembali ke *Khittah* dan hubungannya yang makin membaik dengan pemerintah. Beliau faham betul akan kemajuan yang telah diraih NU Wonosobo karena beliau merupakan Rois Syuriah PCNU Wonosobo dalam 6 periode sebelum NU kembali ke *Khittah* (Muzan, 2003 : 35). Berdirinya beberapa masjid berkat Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP), didirikannya Bank Muamalat Islam Indonesia (BMII), kemudian dilanjutkan dengan program pengiriman da'i – da'i di daerah transmigrasi, munculnya undang – undang peradilan agama, diperbolehkannya siswi memakai jilbab dan sebagainya (Suara Merdeka, Sabtu, 19 Oktober 1991). Beliau juga mengungkapkan bahwasanya yang beliau katakan ini adalah benar adanya, tidak menyuarakan suara dari pemerintah.

K.H. Habib Idris merupakan salah satu saksi sejarah perjalanan NU Wonosobo yang masih hidup sampai sekarang. Beliau mengutarakan sikap politik yang beliau ambil ketika NU kembali ke *Khittah* 1926. Dimulai dengan mundurnya dari dunia politik dan kemudian mengikuti ajakan K.H Muntaha untuk bergabung bersama Golkar.

Sikap yang beliau ambil hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh seniorinya K.H. Muntaha. Cita – cita yang ingin di wujudkan oleh K.H. Muntaha, dalam dunia pendidikan membuat K.H. Habib Idris juga mengikuti sikap K.H. Muntaha. Beliau sebenarnya sudah mulai terlibat dalam dunia pendidikan semenjak berdirinya Universitas Nahdatul Ulama di Wonosobo pada tahun 1975 (Muzan, 2003 : 45), beliau berperan sebagai dosen saat itu. Mbah Mun, menyiapkan konsep pengkaderan, agar ada reorganisasi. Orientasi Mbah Mun, dari politik ke pendidikan. Dilandasi oleh banyaknya kisah kegagalan pendidikan di masa lalu, Muhammadiyah gagal, UNU gagal, PGRI tidak laku, dan Mbah Mun ingin mendirikan IIQ yang didukung oleh pemerintah. Pemerintah mendukung juga punya maksud, karena saat itu Mbah Mun punya massa yang besar. Karena pemerintah saat itu adalah Golkar, mau tidak mau Mbah Mun bergabung dengan Golkar (wawancara langsung dengan K.H Habib Idris pada tanggal 7 Maret 2015).

Perbedaan yang dirasakan ketika berada di Golkar dan PPP adalah ketika berada di

PPP, mereka berhadapan dengan kekuasaan. Ketika masih berada di PPP, akan mengajukan usulan atau konsep pada pemerintah selalu menemui kesulitan bahkan sering mengalami kegagalan. Apabila tidak ada Elit NU yang bisa menembus masuk ke pemerintah maka selamanya konsep – konsep yang dibangun PPP akan senantiasa gagal, makanya tidak ada lembaga pendidikan dari pada perjuangan PPP.

K.H. Habib Idris berpedoman dalam politik sampai sekarang adalah mendukung belum tentu memilih, itu bisa saja sebab itu tanggung jawab moral. Dalam kancah politik, harus ada yang tampil, hal tersebut dilakukan lantaran jika hanya berdiam diri maka negara akan menjadi kacau. Sikap K.H Habib Idris kemudian membuat dirinya dimusuhi tarekat dan oleh kyai – kyai yang tidak faham akan maksudnya juga ikut memusuhi, termasuk K.H. Zainuddin juga tidak suka dengan K.H Habib Idris. K.H Habib Idris punya niat mendukung Golkar dalam rangka strategi (wawancara langsung dengan K.H. Habib Idris pada tanggal 30 Desember 2014).

#### **Elit NU yang Berada di PPP**

Pondok pesantren Darussakilm yang berada di Tempelsari, Kalikajar, Wonosobo, merupakan pondok yang dahulu diasuh oleh K.H. Zainuddin, semenjak beliau wafat maka posisinya diambil putera – putera beliau dalam melanjutkan pondok ini. Ada pula putera beliau, K.H. Ismail yang mendirikan pondok baru disebelah selatan pondok K.H. Zainuddin. Dalam percaturan politik di Wonosobo semasa Orde Baru dan massa NU baik sebelum maupun setelah NU kembali ke *Khittah* dari tahun 1984 – 1998, K.H. Zainuddin atau yang akrab disapa Mbah Zainuddin ikut terlibat aktif dalam Partai Persatuan Pembangunan.

K.H. Ismail menjelaskan kiprah ayah beliau dalam politik, atau tepatnya bagaimana sikap politik ayah beliau dan juga bagaimana dukungan yang diberikan K.H. Zainuddin terhadap PPP. Kemudian K.H. Ismail menjelaskan bahwasanya, PPP adalah fusi dari partai Islam, dan fusi tersebut belumlah dihapus, maka tidaklah salah jika orang NU masih berada di PPP karena alasan fusi tersebut tidak dihapus, adanya *Khittah* juga menjadi perselisihan yang artinya semangat NU pada tahun 1926, artinya hanya bergerak dibidang keagamaan, sosial agama. Tapi sebagian warga NU ada yang mengartikan *Khittah* itu harus keluar dari PPP, sementara orang PPP yang masih di NU mengartikan bahwa NU kembali ke *Khittah* 26 bukan keluar dari PPP. NU berada di mana

asal tidak terkait dengan politik praktis, terjadinya perbedaan penafsiran makna ini, sehingga terjadi perselisihan antar warga NU (wawancara langsung dengan K.H Ismail pada tanggal 2 Januari 2015).

Sikap politik yang ditunjukkan K.H. Zainuddin terhadap PPP, selain secara langsung ikut turun dalam kampanye dalam PPP, juga ketika beliau memilih bergabung bersama K.H. Ibrohim Jawar dalam memprjuangkan PPP di Kabupaten Wonosobo (wawancara langsung dengan K.H. Masrukin pada tanggal 19 Februari 2015). Kegiatan K.H. Zainuddin memang dihabiskan dengan mengasuh Pondok Tempelsari dan juga pengajian – pengajian di daerah, beliau tidak ikut terlibat dalam UNU seperti 2 tokoh elit NU lainnya.

K.H. Ibrohim lahir pada tahun 1929, K.H. Ibrohim sendiri berasal dari Desa Maron Wonosobo, kemudian beliau menikah dengan orang Larangan Wonosobo. Setelah menikah kemudian K.H. Ibrohim mendirikan sebuah Pondok di Larangan. Kepindahan beliau ke Jawar, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo ketika tahun 1973, pada saat itu pula beliau mendirikan sebuah pondok baru di Jawar. Pada masa awal Pondok Jawar ini berdiri, santrinya hanya putera saja, jumlahnya sekitar 100 orang (wawancara langsung dengan K.H. Masrukin pada tanggal 19 Februari 2015).

Mengenai kiprah beliau di bidang politik, semenjak NU kembali ke *Khittah* maupun sebelum *Khittah*, K.H. Ibrohim tetap berada dalam PPP. Namun K.H. Ibrohim tidak secara langsung terjun di atas panggung ketika sedang berkampanye sedikit berbeda dengan K.H Zainuddin Tempelsari, beliau menyuarakan dukungan terhadap PPP, di forum – forum yang beliau ikuti. Di ungkapkan oleh K.H. Masrukin salah satu contoh bahwa K.H. Ibrohim tetap mendukung PPP pasca NU kembali ke *Khittah* adalah ketika dalam sebuah forum pengajian K.H. Ibrohim mengajarkan shalawat PPP kepada yang hadir dalam forum tersebut (wawancara langsung dengan K.H Masrukin pada tanggal 19 februari 2015).

Alasan K.H. Ibrohim ketika NU kembali ke *Khittah* tetap bertahan dalam PPP, menurut K.H. Masrukin adalah “*Dahulu ibaratnya K.H. Ibrohim menjadi semacam penyeimbang, jika semuanya pindah ke Golkar semua maka tidak akan ada yang menjadi penyeimbang dalam politik*” (wawancara langsung dengan K.H Masrukin pada tanggal 19 februari 2015).

Pihak pemerintah rupanya ingin mengajak K.H. Ibrohim untuk turut bergabung bersama Golkar, hal tersebut terlihat dengan

adanya usaha pemerintah untuk mendekati K.H. Ibrohim melalui berbagai lini. Salah satunya adalah melalui bantuan yang ingin diberikan pemerintah pada Pondok Jawar, namun dengan tegas K.H. Ibrohim menjawab dalam suatu sambutan yang dihadiri pemerintah ketika melakukan kunjungan ke Pondok Jawar yang bermaksud untuk memberikan bantuan (wawancara langsung dengan K.H Masrukin pada tanggal 19 febuari 2015).

*“Terimakasih atas kehadiran Pak Kapolda di Pondok Jawar ini dan saya tahu bapak Kapolda rawuh (datang) di pondok pesantern ini akan memberikan bantuan yang sebanyak – banyaknya terimakasih sekali, namun bahwa tugas dari pada Kapolda adalah khusus keamanan kalau membantu berupa materi itu tidak benar.”* (wawancara langsung dengan K.H Masrukin pada tanggal 19 febuari 2015).

K.H. Masrukin juga menjelaskan bahwa K.H. Ibrohim tetap bertahan di PPP, saat K.H. Chuldhuri Tegat rejo mendirikan P4SK dan mengundang seluruh kyai di Karisidenan Kedu, saat itu Wonosobo yang diundang adalah Mbah Muntaha, Mbah Zainudin, Mbah Ibrohim, dan Mbah Maskhur. Waktu itu Mbah Muntaha kurang menerima dengan P4SK, yang menerima Mbah Zainuddin, kemudian Mbah Ibrohim juga menerima dan menyatu dengan Mbah Zainuddin.

Setelah Mbah Muntaha menyatakan ke Golkar, Mbah Ibrohim tidak setuju, sekarang kalau Mbah Ibrohim pindah ke Golkar, ada sesuatu yang ditakutkan, karena pengaruh Mbah Muntaha di wilayah Wonosobo sudah sangat luas, jika Mbah Ibrohim juga ke Golkar, maka tidak akan ada yang menjadi penyeimbang (wawancara langsung dengan K.H Masrukin pada tanggal 19 febuari 2015).

Dampak Sikap Politik Elit NU Pasca Kembali ke Khittah di Kabupaten Wonosobo Tahun 1984 – 1998

Dampak yang terjadi akibat sikap politik yang diambil oleh NU Wonosobo berdampak antara lain bagi pemerintah, bagi organisasi NU Wonosobo, bagi partao politik, dan bagi pilihan politik warga NU. Secara garis besar dampak perubahan yang paling dirasakan adalah bagi partai politik, dengan bergabungnya K.H Muntaha dan K.H Habib Idris makin memperkokoh posisi Golkar di beberapa kali pemilu yang berlangsung. PPP dan PDI sendiri juga terkena dampak yang paling merasakan perubahan sikap politik elit NU adalah PPP, terlebih pada pemilu tahun 1987 jumlah suara

mereka turun drastis dan Kecamatan-kecamatan di Wonosobo yang biasanya menjadi basis kekuatan PPP berhasil diambil alih oleh Golkar.

Pembangunan yang berjalan baik selama tahun1990an di Wonosobo tidak terlepas kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan kyai NU Wonosobo. Berdirinya sarana pendidikan Rumah Sakit Islam (RSI) Wonosobo juga berkat diadakannya sebuah perkumpulan pengajian yang bernama *Jamiatul Hufadz* yang kemudian ditindak lanjuti dengan berdirinya yayasan Yakumi untuk mengurus pembangunan RSI. Program-program dari bupati juga sering mengadakan musyawarah dengan kyai-kyai NU.

Bagi organisasi NU, dengan kembalinya NU ke Khittah, mengurangi pengawasan pihak pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan oleh NU. Bidang-bidang garapan NU bisa dilaksanakan, diantaranya bidang dakwah, pendidikan, dan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Untuk pilihan politik warga NU setelah sikap politik yang diambil oleh kyai-kyai NU Wonosobo sedikit berubah, hal ini senada dengan apa yang dialami oleh kyai panutan mereka masing-masing. Santri pondok Kalibeber, Jawar, dan Tempel ikut dengan suara kyai masing-masing. Sementara warga sekitar pondok juga tetap satu suara dengan kyainya. Ketika memasuki tahun 1998 warga NU Wonosobo kemudian banyak yang beralih mendukung PKB, setelah Mbah Mun juga bergabung dengan PKB.

## **Kesimpulan**

Nahdatul ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang memunyai cabang diberbagai daerah di Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Wonosobo. Perkembangan situasi di Indonesia membuat NU akhirnya ikut terjun di dunia politik. Masyumi, Partai NU, PPP adalah tiga partai politik yang NU berada didalamnya. Pada tahun 1986 NU memutuskan kembali ke Khittah 1926, dimana salah satu isi dari Khittah tersebut adalah dengan menyerahkan urusan politik kepada masing-masing individu NU, NU tidak terikat lagi bersama partai politik manapun. Kembalinya NU ke Khittah ini langsung berdampak pada berubahnya sikap politik elit NU dimana elit NU disini adalah para kyai. Elit NU Wonosobo juga mengambil sikap politiknya sendiri-sendiri, ada yang kemudian beralih ke Golkar karena strategi politik dan ada yang tetap bertahan di PPP karena merasa bahwa fusi partai-

partai Islam dalam PPP belum dihapus.

Sikap politik elit NU Wonosobo yang beragam membuat dinamika perpolitikan sendiri di Kabupaten Wonosobo, yang kemudian turut berdampak di berbagai hal. Dampak bagi pemerintah, bagi organisasi NU, bagi partai politik dan bagi pilihan politik warga NU. Setelah lahirnya PKB elit NU Wonosobo yang sebelumnya berada di Golkar kemudian beralih mendukung PKB dan juga ada yang kemudian berhenti dari dunia politik praktis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basri. 2006. *Metodologi Penelitian Sejarah, Pendekatan, Teori dan Praktek*. Jakarta: Restu Agung
- Daman, Rozikin. 2001. *Membidik NU, Dilema Percaturan NU Pasca Khittah*. Yogyakarta: Gama Media
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Miles, Matthew B dan Michael Huberman. 1998. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Tjepjep Rohendi. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Muzan, Ahmad (Ed). 2003. *Sejarah dan Wacana Pemikiran Ke Islaman NU Wonosobo Dari Masa Ke Masa*. Wonosobo: Yayasan fata nugraha
- Muzan, Ahmad. 2013. *Bunga Rampai: Nahdatul Ulama Wonosobo 1931-awal Reformasi*. Wonosobo : Pustaka Alfa
- Sholikin, M. 2005. *Sejarah Peradaban Islam*. Semarang: RaSAIL
- Sitompul, Einar M. 2010. *Nahdatul Ulama dan Pancasila*. Yogyakarta: Lkis.
- Suyono, Elis dan Samsul Munir. 2004. *Biografi KH. Muntaha Al-Hafidz, Ulama Multidimensi*. Wonosobo: UNSIQ Press.
- Wawancara dengan KH. Habib Idris pada tanggal 30 Desember 2014
- Wawancara dengan Ahmad Muzan pada tanggal 27 Desember 2014
- Wawancara langsung dengan Drs.K.H. Muchotob Hamzah, M.M pada tanggal 5 Januari 2015
- Wawancara langsung dengan K.H Habib Idris pada tanggal 7 Maret 2015
- Wawancara langsung dengan K.H Ismail pada tanggal 2 Januari 2015
- Wawancara langsung dengan K.H. Masrukin pada tanggal 19 Febuari 2015